Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi.
p–ISSN: 2775-9822
e-ISSN: 2775-9822
Vol. 6, No. 1, April 2025

PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI EMPIRIS PADA DESA-DESA DI KECAMATAN PULAU MOA)

THE INFLUENCE OF GOOD GOVERNANCE IN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT (EMPIRICAL STUDY OF VILLAGES IN PULAU MOA DISTRICT)

Sitti Fatimah Kamarudin[1*], Thimotina Killay[2], Vio Nova Tanody[3]
Program Studi Akuntansi, PSDKU Universitas Pattimura
Jalan Tiakur, Kota Tiakur (97442), Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, Indonesia
Email: sitti.kamaruddin@lecturer.unpatti.ac.id*

Abstrak
Pada dasarnya pengelolaan keuangan desa yang baik haruslah sesuai dengan prinsip *good governance* agar terarah sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Proses pengelolaan dana desa yang berdasarkan prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, dapat dilakukan melalui tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, sampai pada tahapan pertangungjawaban keuangan untuk mewujudkan program perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partspasi terhadap pengelolaan keungan. Metod yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil regersi menunjukan bahwa transparansi, akuntabilita, partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa yaitu dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa maka semakin baik pengelolaan keuangan desa. Semakin baik akuntabilitas yang diterapkan pemerintah desa pengelolaan keuangan desa maka semakin meningkat pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: Transparansi; Akuntabilitas; Partisipasi; Pengelolaan Keuangan

Abstract
Basically, good village financial management must be in accordance with the principles of good governance so that it is directed so that it can prevent fraudulent actions. The process of managing village funds based on the principles of good governance, namely transparency, accountability and participation, can be carried out through the planning stage, the implementation stage, to the financial accountability stage to realize the development planning program that suits the needs of the community. The purpose of this study was to determine the effect of transparency, accountability and participation on financial management. The method used in this study is multiple linear regression analysis. Based on the results of the regression, it shows that transparency, accountability, and participation have a positive effect on village financial management, namely in accounting for village finances, the better the management of village finances. The better the accountability implemented by the village government in managing village finances, the better the management of village finances.

Keywords: *Transparency; Accountability; Participation; Financial Management*

Received	:	19th April 2025
Revised	:	25th April 2025
Accepted	:	28th April 2025
Published	:	5th May 2025

How to cite	:	Kamarudin, S., Killay, T., & Tanody, V. (2025). PENGARUH GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, *6*(1), 54-62. https://doi.org/10.30598/kupna.v6.i1.p54-62
DOI	:	https://doi.org/10.30598/kupna.v6.i1.p54-62
License	:	This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Copyright	:	©2025 *Author(s)*

1. Pendahuluan

Membangun desa sama artinya membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik yang tertuang dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik. Perkembangan saat ini, peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* difokuskan untuk menciptakan sistem birokrasi yang handal dan transparan, khususnya bagi pembuatan laporan keuangan yang didalamnya terdapat banyak informasi penting untuk pertimbangan pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan sebagai tolak ukur kinerja. Akuntansi berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan organisasi sektor publik yang sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Laporan keuangan adalah landasan utama dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dari organisasi sektor publik, jadi jika laporan keuangan yang disusun oleh organisasi sector publik tersebut dapat diandalkan dan transparan maka dapat membantu para stakeholder dan pemangku kepentingan dalam menyuarakan pendapat untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi organisasi sektor publik.

Penelitian ini dilakukan pada desa se Kecamatan Pulau Moa. Kecamatan pulau Moa merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya dan juga termasuk kecamatan yang turut menunjang perekonomian Kota Tiakur yang terlihat dari banyaknya toko-toko pedagang. Beberapa potensi infrastruktur sarana dan prasarana desa yang dimiliki oleh desa- desa di Kecamatan Pulau Moa seperti jalan raya, sekolah, tempat beribadah dan lembaga pemerintahan.

Pada tahun 2019 pemerintah desa wakarleli yang merupakan salah satu desa di kecamatan Pulau Moa memiliki program Badan Usaha Milik Desa. BUMDes yang dimiliki desa, berupa penjualan sembako dan untuk pembangunan gedung warung kopi dan lapangan Futsal. Pemerintah desa berharap dengan adanya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini, dapat meningkatkan perekonomian desa. Untuk mendukung terselanggaranya program BUMDes, pemerintah desa membentuk kepengurusannya dan pada tahun yang sama sudah beroperasi. Kepengurusan pengelolaan badan usaha miliki desa di Kecamatan Pulau Moa diambil dari anggota masyarakat desa yang diharapkan dapat berdampak bagi desa, masyarakat yang mengelola dan masyarakat sekitar.

Dengan adanya pembentukan Badan Usaha Milik Desa, menunjukan bahwa pemerintah desa sedang berupaya memenuhi asas pengelolaan keuangan yang baik berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang desa. Namun dalam kenyataannya, Badan Usaha Milik Desa tidak beroperasi dengan lancar sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan desa yang berakibat pada besarnya anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang capai, dikarenakan BUMDes tidak berjalan lancar yang berdampak pada penutupan. Pembangunan Badan Usaha Milik Desa oleh pemerintah desa di Kecamatan Pulau Moa sangat mengharapkan adanya laba bagi pendapatan desa, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Bahkan pemerintah desa tidak secara langsung memberikan informasi kepada masyarakat tentang kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, hal ini berkaitan dengan proses transparansi yang harus dilakukan berdasarkan *good governance* pemerintah desa di Kecamatan Pulau Moa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengaruh positif akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa semakin transparan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa seperti menyediakan informasi, mengumumkan secara terbuka dan mendaptakan

pengawasn langsung dari pemerintah maka semakin baik pengelolaan keuangan desa. Pengaruh positif akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa seperti menetapkan fungsi, tugas serta wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat desa, jujur, menindaklanjuti keluhan masyarakat dalam pengelolaan keuangan maka semakin baik pengelolaan keuangan desa. Partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi seperti keterlibatan masayarakt dalam mengambil keputusan memberi masukan serta penilaian kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa maka semakin baik pemerintah desa mengelola keuangan desa. Kontiribusi yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan baik bagi desa-desa yang ada di kecamatan Pulau Moa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al (2021) membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa-desa di Kecamatan Tanah Kampung. Sedangkan penelitian yang juga dilakuakan oleh Sukmawati dan Nurfitriani (2019) membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Agensi

Teori agensi menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent.* Teori agensi membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agen*t) yang melakukan pekerjaan. Teori agensi memandang manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri (*self-interest*) bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship theory* (Wulandary et al., 2022).

Pemerintah desa (*agent*) harus bertanggungjawab kepada masyarakat desa (*principal*) dalam pelaporan keuangan karena masyarakat *(principal*) wajib mengetahui keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Jadi keuangan desa adalah segala sesuatu yang dapat di nilai dengan uang dan dapat digunakan untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang mendukung pemerintah desa dalam mencapai tujuan desa, mensejahterakan masyarakat (*principal*) serta membangun desa.

2.2 *Good Governance*

Good Governance merupakan mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah public (Lembaga Administrasi Negara, 2000). *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. tidak kompeten (Biduri, 2018).

2.3 Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan, artinya transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Biduri, 2018). Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) menunjukkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik dengan mempertimbangkan hak publik untuk memahami secara terbuka dan

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam organisasi sumber daya yang dipercayakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

2.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah yang diharapkan mampu memberikan pertanggungjawaban atas segala bentuk aktifitas yang diberikan kepada pihak pemberi amanah sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan demi tercapainya suatu tujuan (Husain et al., 2023). Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilainilai seperti efsiensi, efektivitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fajrin et al., 2022). Menurut Putra (2018), akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja instansi pemerintah sehingga menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntabilitas mencakup dua jenis yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal (Kartika Tungga Dewi et al., 2024).

2.5 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mendefinisikan partisipasi peran serta masyarakat sebagai peran dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat secara langsung maupun tidak langsung mengambil keputusan melalui lembaga yang dapat menyampaikan keinginannya (Siregar et al., 2023).

2.6 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Nurhaedah et al (Nurhaedah et al., 2023), Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan dapat menampung dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, APBN. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa yang dibantu oleh tim pelaksana terdiri dari perangkat desa, seperti yang diuraikan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab III pasal 4, tim pengelola keuangan desa termasuk kepala desa, sekeretaris desa, kepala bagian, bendahara desa.

2.7 Model Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan Model penelitian yang menjelaskan pengaruh tranparansi, Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, yangdapat digambarkan sebagai berikut:

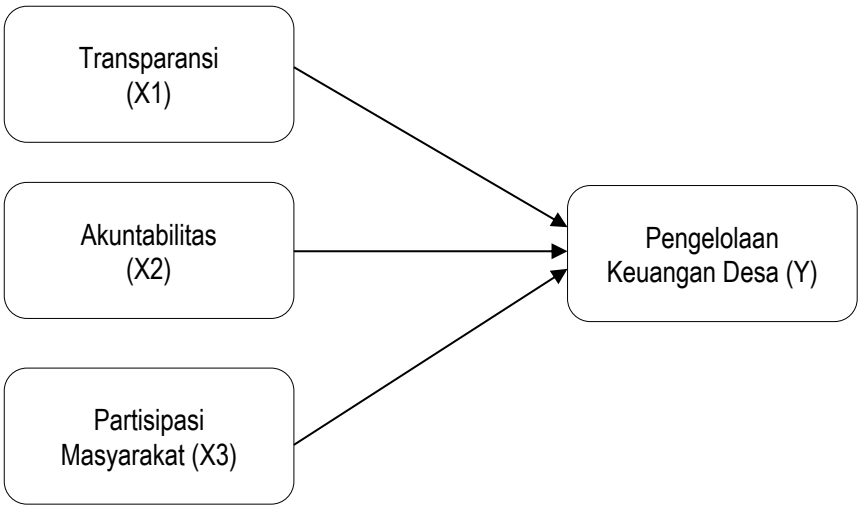

Gambar 1. Model Penelitian

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengujian hubungan antar variabel (Ismail, 2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui jawaban responden melalui kuesioner penelitian ini menggunakan 54 perangkat desa BPD sebagai responden dan didasarkan pada metode purposive sampling dan teknis analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Persamaan model regresi berganda dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\gamma = \alpha + \beta\chi1 + \beta\chi2 + \beta\chi3 + \varepsilon$$

4. Hasil dan Pembahasan

Uji koefisien determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui besaran dalam persen pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel devenden. Dari uji determinasi dihasilkan nilai Adjusted R Square sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.679[a]	.461	.429	1.01751

a. Predictors: (Constant), Pasrtisipasi, Akuntabilitas, Transparansi
b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,429 yang berarti bahwa variasi variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi mampu menjelaskan sebesar 42,9% variasi variabel pengelolaan keuangan desa dan sisanya sebesar 57,1 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

4.1 Hasil Uji Statistik

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Sebagaimana hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1	(Constant)	7.251	2.600		1.120	. 005
	Transparansi	.303	.104	.217	2.143	.013
	Akuntabilitas	.518	.169	.409	3.070	.002
	Partisipasi	.198	.132	.184	1.905	. 024

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil uji parsial, menunjukan bahwa transparansi (X_1) memperoleh nilai signifikan 0.013 < 0.05. Hasil ini mendukung hipotesis H_1 yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, yang menunjukan bahwa semakin transparan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa maka semakin baik pengelolaan keuangan desa. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip tranparansi dalam pengelolaan keuangan desa dari seluruh desa yang ada pada Kecamatan Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya telah dijalankan dengan baik. Hal ini didukung dengan hasil rekapitulasi jawaban responden yang menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab setuju dengan indikator transparansi yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa menyediakan informasi proses pengelolaan keuangan Desa untuk masyarakat, Pemerintah Desa juga mengumumkan secara terbuka proses pengelolaan keuangan Desa tersebut agar masyarakt dapat mengetahuinya serta kelengkapan penyediaan informasi pengelolaan keuangan Desa oleh pemerintah desa di nilai dan diawasi oleh masyarakat sebagai bagian dari control sosial. Hasil dari penelitian ini jelas menunjukan bahwa perangkat desa telah memberikan kesempatan masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Dengan adanya transparansi laporan keuangan, maka kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi semakin meningkat.

Hasil penelitian ini mengacu pada teori *agency* yang menyatakan bahwa dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi keuangan secara transparan bagi para pengguna informasi keuangan termasuk masyarakat sehingga dapat menilai transparansi pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut harus berlaku transparan dalam semua kegiatan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan. Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan

pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dalam pemerintahan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amleni et al (2022) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa Lanaus. Penelitian oleh Garund dan Ga (2020) juga membuktikan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan aloksi dana desa pada Desa Manuela.

4.2.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil uji parsial, menunjukan bahwa akuntabilitas (X_2) memperoleh nilai signifikan 0.002 < 0.05. Sehingga hasil ini mendukung hipotesis H_2 yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas sangat berpengaruh pengelolaan keuangan desa, karena akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik, termasuk dalam penyampaian pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat.

Semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka semakin meningkat pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil rekapitulasi jawaban responden yang mayoritas respondennya menjawab setuju dan sangat setuju bahwa pemerintah desa telah menetapkan rincian fungsi, tugas serta wewenang dan tanggung jawab masing-masing yang selaras dengan tujuan pemerintah desa. Selain itu, dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya, pemerintah desa juga akan menindaklanjuti setiap keluhan atau pengaduan yang disampaikan masyarakat dalam proses Pengelolaan Keuangan Desa serta setiap aparat pemerintah desa melaksanakan tugasnya secara jujur terutama dalam proses pengelolaan keuangan desa. Hal ini menjelakan bahwa dalam mengelola keuangan desa aparatur desa harus bersikap jujur agar pengelolaan keuangan desa juga berjalan dengan baik dan jauh dari tindakan kecurangan. Berdasarkan jawaban responden tersebut mengindikasikan bahwa prinsip akuntabilitas telah diterapkan dengan baik oleh pemerintah desa yang ada pada Kecamatan Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Penelitian ini mengacu pada teori keagenan (*agency theory*) yang mana *principal* memberikan wewenang kepada *agent*, yang nantinya akan menjalankan amanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterkaitan teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah desa sebagai agent berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, mengungkapkan seluruh aktivitas dari program-program dese dan menyajikan laporan hasil terkait dengan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat *(principal)*. Akuntabilitas berarti prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat secara terbuka. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh mayarakat secara terbuka. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amleni (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa Namo Gajah. Penelitian oleh Putri et al (2021) membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa Songan di Kecamatan Kintamani.

4.2.3 Pengaruh Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil uji parsial, menunjukan bahwa partisipasi (X_3) memperoleh nilai signifikan 0.024 < 0.05. Sehingga hasil ini mendukung hipotesis H_3 yang menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang selalu melibatkan mayarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek/program yang dilaksanakan dan didanai oleh keuangan desa. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada seluruh perangkat desa yang ada pada Kecamatan Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya diketahui

bahwa banyak perangkat desa yang menyatakan setuju bahwa masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan desa, masyarakat desa juga memberikan masukan kepada aparat pemerintah desa serta masyarakat desa memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran desa. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya sudah berjalan dengan baik. Partisipasi masyarakat memberikan dampak positif bagi desa, sehingga masyarakat siap menyumbangkan ide, pengetahuan, keterampilan dan karya untuk pembangunan desa serta mayarakat dapat dengan mudah mengawai jalannya pengelolaan keuangan desa sehingga program/kegiatan yang dijalankan menjadi tepat sasaran. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa maka semakin baik pemerintah desa mengelola keuangan desa tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan, dalam hal ini pemerintah desa sebagai agen yang memperoleh mandat untuk mengelola keuangan desa kepada masyarakat. Artinya dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya pemerintah yang menjadi peran utama namun masyarakat juga berhak ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemerintah desa telah mengelola keuangan desa dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat, agar rencana-rencana atau program desa dapat berjalan dengan tepat sasaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al (2021) membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa di Kecamatan Tanah Kampung. Penelitian Sukmawati dan Nurfitriani (2019) membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengaruh transparansi desa dalam pengelolaan keuangan desa, membuktikan bahwa semakin transparan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa seperti menyediakan informasi, mengumumkan secara terbuka dan mendaptakan pengawasn langsung dari pemerintah akan semakin baik pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa membuktikan bahwa semakin baik akuntabilitas dalam menetapkan fungsi, tugas serta wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat desa, jujur dan menindaklanjuti keluhan masyarakat dalam pengelolaan keuangan, akan semakin baik pengelolaan keuangan desa. Pengaruh partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa membuktikan bahwa semakin tinggi partisipasi seperti keterlibatan masayarakat dalam mengambil keputusan memberi masukan serta penilaian kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, akan semakin baik pemerintah desa mengelola keuangan desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Amleni, W., Mentu, H., & Lake, Y. (2022). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, *1*(1), 30–36. https://doi.org/10.58290/jmbo.v1i1.9

Biduri, S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Umsida Press. https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-20-1

Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten

Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntasi*, *5*(2), 745–757. https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.694

Fajrin, F., H, F., & Suwandi, M. (2022). Good Village Governance: Mencegah Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa Melalui Aplikasi Siskeudes. *ISAFIR Islamic Accounting and Finance Review*, *3*(2), 172–186. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index

Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, *8*(1), 19–27. https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363

Husain, S. P., Seber, I. S., & Monoarfa, V. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review Journal Homepage*, *4*(1), 66–76.

Ismail, H. F. (2018). *Statistika Untuk Penelitian dan Ilmu-Ilmu Sosial*.

Kartika Tungga Dewi, R., Anggarani, D., & Hasan, K. (2024). Akuntabilitas dan Efektivitas Penggunaan Dana Direktorat Kemahasiswaan Universitas Brawijaya untuk Kegiatan Eksekutif Mahasiswa (EM) Tahun 2023. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, *3*(6), 2418–2423.

Nurhaedah, Wildam, A. A., Rum, M., & Surianto, S. (2023). Jurnal Mirai Management Deskripsi Tata Kelola Keuangan Desa Masiku di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Mirai Management*, *8*(1), 239–256.

Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(2), 258–280.

Siregar, M., Fernandez, F., & Tristanto, Y. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Mempertahankan Desa Mandiri (Studi Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *3*(1), 35–51. https://doi.org/10.30742/juispol.v3i1.2889

Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis , Pasar Modal, Dan UMKM*, *2*(1), 52–66. https://www.researchgate.net/publication/356782420

Wulandary, A., Rini, T. H. C., & Khaerani, A. (2022). Implementasi Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah. *FAIR : Financial & Accounting Indonesian Research*, *3*(1), 45–57.